

Surat-surat Ternate: Analisis Struktur dan Isi

Syadiidah

Institut Kesenian Jakarta dan Rumah Belajar O-Friends
syadiidahdee@yahoo.com

This article discusses the Malay manuscript of Surat Keputusan Ternate as a formal letter that was used in the past. This manuscript tells us a decree handed down by the royal permission Sultan Taajul Malik Amiruddin Iskandar Kaulain Syah to give punishment to Tambuku's Kingdom because of rebellion against to Ternate. This manuscript contains the inspection violation process, the articles, and punishments for the perpetrators of the rebellion. The King of Tambuku and his commanders get a penalty in the form of exile. To understand this text, philological studies were conducted to produce text editing. The manuscript was transliterated from Jawi's script to Latin's script and was edited using the critical method to be easily read and understood. Moreover, the letter would be classified and the form and the structure would be analyzed to know how the previous letter is different from the ancient letter. Furthermore, this journal also described the incident that caused the writing of Surat Keputusan Ternate.

Keywords: Malay Manuscript; letter structure; Tambuku; Ternate

Artikel ini membahas manuskrip Melayu *Surat Keputusan Ternate* sebagai surat formal yang berlaku pada masanya. Naskah ini menceritakan surat keputusan yang diturunkan oleh kerajaan Ternate atas izin Sultan Taajul Malik Amiruddin Iskandar Kaulain Syah untuk memberi hukuman kepada Kerajaan Tambuku karena telah melakukan pemberontakan terhadap Ternate. Naskah ini berisi proses pemeriksaan mengenai pelanggaran-pelanggaran, pasal-pasal, dan hukuman bagi para pelaku pemberontakan. Raja Tambuku dan para panglimanya mendapatkan hukuman berupa pengasingan. Untuk memahami naskah ini, pengkajian filologi dilakukan untuk menghasilkan edisi teks. Naskah ditransliterasi dari aksara jawi ke aksara latin dan disunting dengan menggunakan metode kritis yang bertujuan agar naskah ini dapat dibaca dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, surat diklasifikasi, struktur dan format dianalisis untuk melihat bentuk surat keputusan pada masa lampau dan perbedaannya dengan surat keputusan masa kini. Selain itu, jurnal ini juga membahas kandungan isi berupa peristiwa pemberontakan, yang dilakukan oleh Kerajaan Tambuku, yang melatarbelakangi turunnya *Surat Keputusan Ternate*.

Kata kunci: Manuskrip Melayu, SKT, struktur surat; Tambuku; Ternate.

Pendahuluan

Indonesia merupakan wilayah yang awalnya terbentuk dari kerajaan-kerajaan kecil yang tergabung atau digabungkan dalam satuan kerajaan yang lebih besar. Hal ini merupakan strategi politik yang dilakukan kerajaan untuk memperluas wilayah kekuasaan. Untuk menjadi kerajaan yang besar, mereka melakukan ekspansi militer dengan menguasai kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, seperti kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang menguasai daerah Semenanjung Malaka sampai Kedah. Kemudian, tujuh abad setelahnya, Kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk menguasai hampir seluruh wilayah Jawa. Selain itu, di Maluku berdiri empat kerajaan besar—Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo—yang menguasai wilayah Maluku dan sekitarnya. Di samping memperluas wilayah kekuasaan, kerajaan-kerajaan besar tersebut juga memperkuat kekuasaan dengan mengadakan hubungan diplomasi. Hubungan diplomasi dilakukan, salah satunya, untuk mendapatkan pengakuan dari kerajaan lain.

Sejarah hubungan kerja sama ini banyak terekam dalam naskah, terutama hubungan diplomasi yang terjadi antara kerajaan dengan pihak kolonial. Hal ini terlihat pada surat tertua pada abad XVI, yaitu surat antara Sultan Abu Hayat, Raja Ternate, kepada Raja Portugal pada tahun 1521¹. Hal ini membuktikan bahwa naskah lama telah merekam peristiwa sejarah yang tercermin dalam surat.

Hubungan diplomasi antara kolonial dengan kerajaan di wilayah nusantara semakin berlanjut. Namun seiring perkembangannya, hubungan diplomasi berubah menjadi keinginan untuk menguasai. Pemerintahan kolonial melancarkan politik *divide et impera* atau politik pecah belah. Kebijakan-kebijakan kolonial yang memberatkan rakyat tersebut telah menimbulkan rasa ketidakpuasan dan kekecewaan. Hal tersebutlah yang menjadi pemicu terjadinya perlawanan kerajaan kecil terhadap kerajaan supremasinya, seperti yang terjadi pada kerajaan lokal di bawah

¹ Mu'jizah, *Surat Resmi dalam Sastra Melayu Lintas Daerah*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2009), h. 11

naungan Ternate, yaitu Tambuku. Perlawanan kerajaan kecil seperti Tambuku telah menyebabkan turunnya *Surat Keputusan Ternate*, yaitu surat yang berisi keputusan dan hukuman untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pemberontakan terhadap Ternate. Peristiwa sejarah berupa proses pemeriksaan terhadap kerajaan kecil di bawah Ternate, yaitu Kerajaan Tambuku terekam dalam naskah lama yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) berkode 113 H 8/ 30 yang menggunakan bahasa Melayu Ternate beraksara jawi.

Naskah 113 H 8/30 ditemukan dalam dua katalog, yaitu *Katalog Naskah Maluku* dan *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Edisi Keempat*. Judul naskah pada kedua katalog ini berbeda, yaitu dalam *Katalog Naskah Maluku* berjudul “*Naskah Pemeriksaan terhadap Raja Tambuku dan Boki Tilah Mahalu*”, sedangkan dalam *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara* berjudul “*Surat Keputusan Ternate*”. Penulis menggunakan judul naskah *Surat Keputusan Ternate* dalam penelitian ini karena judul naskah ini dianggap sesuai dengan isi naskah. Pertimbangannya adalah dalam naskah tersebut tidak hanya berisi pemeriksaan terhadap Raja Tambuku dan Boki Tilah Mahalu, seperti yang tertera dalam judul naskah di *Katalog Naskah Maluku*, tetapi juga kepada orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan terhadap Ternate. Selain itu, naskah ini tidak hanya berisi pemeriksaan, tetapi juga tiga hal pokok yang terdapat dalam surat keputusan, yaitu konsideran yang terdiri atas peraturan atau pelanggaran yang dilakukan, desideratum yang berisi tujuan surat keputusan, dan diktum yang memuat hasil keputusan.

Berdasarkan informasi dalam *Katalog Naskah Maluku*, *Surat Keputusan Ternate* berisi proses pemeriksaan terhadap Raja Tambuku, Kaicili Dongke Kombe, dan Boki Tilah Mahalu. Hal ini disebabkan Raja Tambuku sebelumnya telah melakukan perjanjian untuk tidak menyerang Ternate. Namun, pada masa pemerintahan Kaicili Dongke Kombe, Tambuku melakukan perlawanan terhadap Ternate. Selain berisi proses pemeriksaan, *Surat Keputusan Ternate* juga memberikan informasi mengenai pasal-pasal pelanggaran dan

keputusan hukuman untuk orang-orang yang bekerja sama dengan Raja Tambuku untuk menyerang Ternate.

Surat Keputusan Ternate atau yang selanjutnya akan disingkat dengan *SKT* ditulis dalam aksara jawi. Huruf jawi adalah huruf Arab yang dipakai untuk menulis naskah Melayu². Penulisan dalam aksara jawi saat ini kurang dipahami oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu, penelitian terhadap naskah *SKT* penting untuk dilakukan.

Hal-hal yang melatarbelakangi penelitian terhadap *SKT* disebabkan oleh sedikitnya penelitian filologi terhadap naskah timur, khususnya surat. Padahal, naskah timur, khususnya surat, merupakan salah satu khazanah Indonesia yang merekam peristiwa yang bisa dijadikan referensi untuk penelitian di bidang sejarah. Selain itu, informasi dalam naskah *SKT*, yaitu Kerajaan Tambuku merupakan informasi baru bagi penulis sehingga penelitian terhadap naskah *SKT* merupakan hal yang menarik untuk dilakukan.

Penelitian terhadap *SKT* akan memberikan informasi mengenai besarnya pengaruh Ternate pada masanya. Melalui penelitian terhadap *SKT*, struktur surat keputusan pada naskah ini dianalisis untuk melihat perbedaan bentuk surat keputusan pada masa lampau dengan surat keputusan pada masa kini. Secara khusus, penelitian ini akan melihat penyebab kerajaan lokal, yaitu Tambuku, melakukan perlawanan terhadap Ternate.

Bertolak dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tidak semua orang dapat membaca naskah *SKT* yang beraksara jawi sehingga edisi teks yang memudahkan pembacaan terhadap naskah ini perlu dilakukan.
2. Struktur surat pada *Surat Keputusan Ternate* sebagai salah satu surat formal pada masanya belum pernah dilakukan sehingga penelitian ini perlu dilakukan.

² Sri Wulan Rujati Mulyadi, *Kodikologi Melayu di Indonesia*, (Jakarta: FSUI Press, 1994), h. 8

3. Sejarah mengenai pemberontakan yang dilakukan oleh Tambuku sebagai kerajaan di bawah naungan Ternate masih sangat sedikit sehingga dibutuhkan penelitian melalui aspek kesejarahan.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di bagian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menghasilkan sebuah suntingan teks naskah *SKT* yang dapat dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
2. Menjelaskan struktur surat keputusan pada naskah lama.
3. Menjelaskan kandungan isi naskah mengenai pemberontakan Tambuku dalam *Surat Keputusan Ternate*.

Dalam menganalisis struktur surat dan kandungan isi naskah *SKT* diperlukan beberapa teori untuk menunjang penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penyuntingan, kodikologi, dan struktur surat keputusan.

Pemilihan metode disesuaikan dengan jenis naskah dan tujuan penyuntingan. Robson³ membaginya ke dalam tiga, yaitu metode stemma, metode diplomatis, dan metode kritis. Penelitian ini menggunakan metode edisi kritis. Kritis berarti bahwa penyunting itu mengidentifikasi sendiri bagian dalam teks yang mungkin terdapat masalah dan menawarkan jalan keluar⁴. Dalam metode ini, Robson menawarkan dua alternatif, yaitu jika penyunting merasa bahwa ada kesalahan dalam teks tersebut, penyunting dapat memberikan tanda baca yang mengacu pada “apparatus kritis”. Di sini penyunting menyarankan bacaan yang lebih baik atau penyunting dapat memasukkan koreksi ke dalam teks tersebut dengan tanda jelas yang mengacu pada apparatus kritis. Di sini bacaan asli akan didaftar dan ditandai sebagai “naskah”⁵. Penggunaan metode kritis ini sesuai dengan tujuan penulisan, yaitu membantu memudahkan pembaca dari kesulitan yang bersifat tekstual sehingga pembaca terbebas dari kesulitan mengenai isinya.

³ S.O Robson, *Prinsip-Prinsip Filologi Indonesia*, (Jakarta: RUL, 1994), h. 15-28.

⁴ S.O Robson, *Prinsip-Prinsip Filologi Indonesia*, h. 25

⁵ S.O Robson, *Prinsip-Prinsip Filologi Indonesia*, h.

Melalui kajian kodikologi, dapat diketahui informasi mengenai penulisan, tanggal, dan tempat penulisan. Bagian yang memberi informasi bermacam-macam mengenai naskah disebut kolofon⁶. Selain melalui kolofon, perkiraan pembuatan surat dapat diketahui melalui cap kertas (*watermark*). Cap kertas adalah semacam gambar pada kertas yang dapat kita lihat dengan nyata, jika kita lihat di tempat yang ada sinar matahari atau lampu⁷. Hal ini berkaitan dengan tujuan utama pencantuman cap kertas, yaitu sebagai suatu tanda dagang untuk menunjukkan kualitas, ukuran, atau pembuat kertasnya⁸.

Di samping kolofon dan cap kertas, dalam naskah *SKT* juga ditemukan cap kerajaan dan tanda tangan orang Belanda pada pembuka isi surat. Hal ini menunjukkan bahwa *SKT* merupakan surat formal yang dikeluarkan oleh kerajaan dan disahkan oleh kedua pihak, yaitu Kerajaan Ternate dan Belanda. Selain itu, penggunaan bahasa dalam naskah juga merupakan bagian dari penelitian kodikologi. Bahasa yang digunakan dalam naskah ini adalah bahasa Melayu Ternate. Bahasa Melayu Ternate merupakan bahasa yang digunakan di Maluku Utara, khususnya Ternate. Struktur pola bahasa Melayu Ternate hampir sama dengan bahasa Melayu Ambon. Hal ini dapat dilihat dari adanya penambahan atau pelesapan fonem /h/ dan akhiran -an yang berubah menjadi -ang. Bahasa Melayu Ternate mempunyai kosakata khusus dan pengucapan yang cepat serta diucapkan dengan intonasi yang tinggi. Hal tersebut merupakan kekhasan yang membedakan bahasa Melayu Ternate dengan bahasa Melayu lainnya.

Untuk menganalisis struktur dalam surat keputusan, peneliti menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh Mu'jizah dalam "Surat Resmi" di *Sejarah Melayu Lintas Daerah*. Struktur tersebut dibagi menjadi halaman muka surat, pembuka surat, isi surat, dan penutup surat. Selain itu, peneliti juga melihat format surat keputusan yang berisi konsideran, desideratum, dan diktum.

⁶ Sri Wulan Rujati Mulyadi, *Kodikologi Melayu di Indonesia*, h. 73

⁷ Sri Wulan Rujati Mulyadi, *Kodikologi Melayu di Indonesia*, h. 63

⁸ Sri Wulan Rujati Mulyadi, *Kodikologi Melayu di Indonesia*, h.64

Arifin⁹ menjelaskan beberapa format surat keputusan yang digunakan pada masa kini, yaitu pada bagian atas surat keputusan dicantumkan keputusan serta nama jabatan pembuat surat keputusan yang ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, nomor surat keputusan dicantumkan di bawah judul keputusan. Di bawah nomor surat keputusan dicantumkan *tentang* yang ditulis dengan huruf kecil. Di bawah kata *tentang* dicantumkan judul keputusan yang diberlakukan. Kata-kata *Menimbang*, *Mengingat*, dan *Memutuskan* ditulis dengan huruf awal kapital dan diikuti titik dua (:). Diktu keputusan dinomori dengan angka arab 1, 2, 3 atau dinomori dengan huruf *Pertama*, *Kedua*, *Ketiga* yang diikuti titik dua (:). Pada bagian akhir surat dituliskan tempat dan tanggal pembuatan surat keputusan. Nama instansi yang mengeluarkan surat keputusan dicantumkan pada bagian akhir, disusul dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat keputusan. Terakhir, penulisan tembusan layaknya surat dinas biasa. Analisis mengenai format surat keputusan yang digunakan pada masa kini berguna untuk melihat perbedaan format surat keputusan pada masa lampau.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk mengkaji sebuah naskah dibutuhkan kajian ilmu filologi. Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mencari dan menelusuri naskah yang sesuai untuk dijadikan penelitian, yaitu surat. Hal ini disebabkan oleh jumlah halamannya yang terbatas sehingga memudahkan penelitian. Di samping itu, pengkajian mengenai surat daerah timur nusantara pada naskah lama pun masih sangat sedikit sehingga penelitian mengenai surat merupakan hal yang baru dan menarik. Selain itu, meneliti naskah peti yang masih minim dalam hal penelitian pun merupakan hal yang menarik sehingga penulis tertarik untuk menjadikan surat pada naskah peti untuk dijadikan penelitian. Berdasarkan tiga kriteria inilah peneliti tertarik untuk meneliti *Surat Keputusan Ternate* untuk dijadikan objek penelitian.

⁹ Zainal Arifin, *Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Surat Dinas*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1996), h. 54-55.

Tahap berikutnya, penelitian ini akan melihat teks dan fisik naskah melalui kajian tekstologi dan kodikologi. Peneliti melakukan inventarisasi, deskripsi, dan melihat kondisi fisik naskah sebagai ciri surat pada masa lampau, seperti kolofon, tulisan, cap kertas, dan cap surat. Selain itu, ukuran pias halaman juga akan dijelaskan sehingga menghasilkan format penulisan surat keputusan pada masa lampau.

Selanjutnya, naskah *SKT* ditransliterasi dengan menggunakan metode edisi kritis yang disertai apparatus kritis. Teks yang ditransliterasi akan disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan disertai dengan pertanggungjawaban penambahan dan penghilangan huruf atau kata dalam bagian pertanggungjawaban transliterasi.

Tahapan terakhir adalah melakukan analisis terhadap struktur surat dan analisis isi naskah melalui pendekatan sejarah. Hal ini dilakukan untuk melihat perbedaan surat keputusan masa lampau dan besarnya pengaruh Kerajaan Ternate pada masanya, serta menganalisis penyebab terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh kerajaan lokal di bawah Ternate, yaitu Tambuku.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Struktur Surat Keputusan Ternate

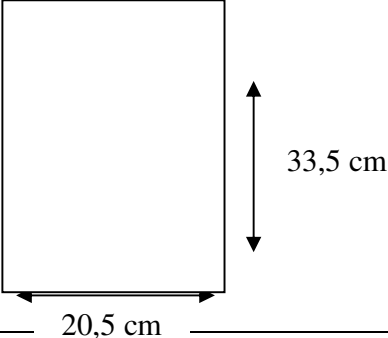
Surat Keputusan Ternate merupakan bentuk surat resmi antara kerajaan Ternate dengan kerajaan Tambuku. Berdasarkan penelitian *SKT*, dapat terlihat perbedaan antara struktur surat keputusan pada masa lalu dengan struktur surat keputusan yang digunakan pada masa kini. *Surat Keputusan Ternate* diawali dengan narasi. Proses pemeriksaan, bantahan-bantahan, dan pelanggaran yang dilakukan, dinarasikan. Hal ini berbeda dengan surat keputusan modern yang langsung masuk pada pokok permasalahan, yaitu dengan menimbang, mengingat, dan memutuskan. Selain itu, *Surat Keputusan Ternate* terdiri atas 24 halaman. Hal ini merupakan keunikan karena pada saat ini surat keputusan umumnya hanya mempunyai jumlah halaman yang terbatas.

Berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Mu'jizah dalam *Surat Melayu Lintas Daerah* struktur surat dibagi menjadi empat,

yaitu halaman muka, pembuka surat, isi surat, dan penutup surat, serta format surat keputusan masa kini yang dilakukan oleh Arifin¹⁰ dapat diketahui perbedaan dalam struktur surat keputusan masa lampau dengan masa kini, di antaranya sebagai berikut,

Halaman Muka

Dalam halaman muka *SKT*, tidak ditemukan informasi apa pun. Halaman muka *SKT* merupakan halaman kosong. Bentuk *SKT* merupakan lembaran yang dijilid menyerupai sebuah buku.

Bagian surat	Ilustrasi Format Surat
Halaman Muka (Halaman kosong) ¹¹	

(Gambar 1: Ilustrasi Halaman Muka Naskah)

Pembuka Surat

Naskah *SKT* diawali dengan cap Kerajaan Ternate dan cap Residen Belanda beserta tanda tangannya di bagian atas surat. Cap dalam surat dipakai sebagai pengganti tanda tangan, tanda keaslian surat.

Dalam *SKT*, letak cap kerajaan sejajar dengan baris pertama pembuka surat. Menurut Windstedt yang dikutip oleh Gallop, jika surat resmi diturunkan oleh kerajaan, cap ditekankan di sebelah kanan, isi surat sejajar dengan baris yang pertama pada ruang puji-

¹⁰ Zainal Arifin, *Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Surat Dinas*, h.56-57

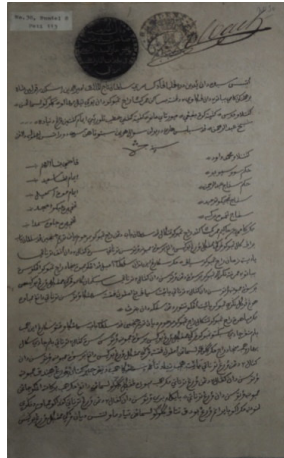
¹¹ Mu'jizah, *Surat Resmi dalam Sastra Melayu Lintas Daerah*, h. 257

pujian itu¹². Cap pegawai dibubuhkan di sebelah kanan juga, namun sejajar dengan puji-pujian di bagian akhir surat, sedangkan cap untuk orang kebanyakan berada di kaki surat. Berdasarkan posisi capnya yang terletak di atas, *SKT* merupakan surat resmi yang diturunkan oleh Kerajaan Ternate.

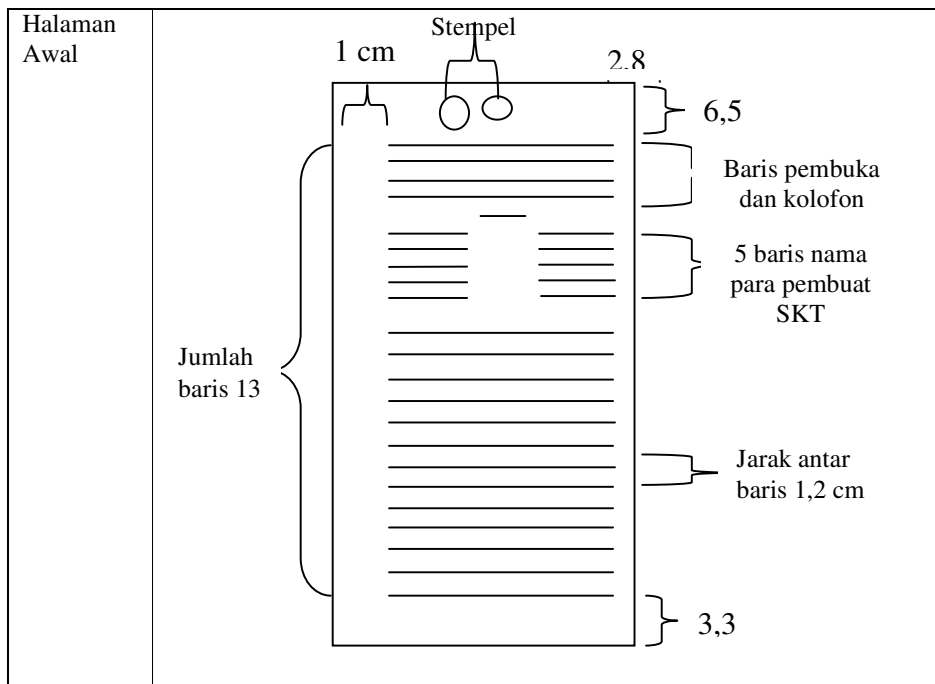
Selain itu, Menurut Dulaurier, posisi cap pada surat berkaitan dengan peringkat orang yang mengesahkan¹³. Semakin kanan cap dibubuhkan, semakin tinggi status penulis. Cap kerajaan Ternate dalam naskah *SKT* terletak setelah cap Belanda. Artinya, posisi Belanda dalam naskah ini mempunyai status lebih kuat dibanding Kerajaan Ternate. Selanjutnya, *SKT* dibuka dengan menarasikan kepentingan pembuatan surat, yaitu pemeriksaan terhadap Raja Tambuku dan para bobatonya. Bagian awal surat menunjukkan bahwa *SKT* turun atas perintah dan izin Sultan Ternate. Pada bagian pembuka surat juga ditemukan keterangan mengenai tanggal pembuatan surat, seperti dalam kutipan berikut “pada sebelas hari, bulan Syawal, harinya Sabtu, tahun 1258 (*SKT*: 1, baris ke-4)”. Berdasarkan informasi tersebut, dapat diketahui bahwa *SKT* ditulis pada hari Sabtu, 11 Syawal 1258 H. Jika dikonversikan ke dalam tahun Masehi, dapat diketahui bahwa surat ditulis pada 15 November 1842. Selanjutnya, pembuka *SKT* juga berisi nama para pembuat surat keputusan. Nama-nama tersebut merupakan para pegawai Ternate.

¹² Annabel The Gallop, “Southeast Asian Manuscript”, *Royal Institute of Linguistic and Anthropology*, (Leiden, 1992)

¹³ Annabel The Gallop, “Southeast Asian Manuscript”, h. 13



(Gambar 2: Cap pada bagian awal surat)



(Gambar 3: Ilustrasi Halaman Awal Naskah)

Berdasarkan format surat keputusan yang dijelaskan Arifin, tanggal pembuatan SK dan nama instansi sekaligus pegawai yang membuat SK ditulis di bagian akhir. Hal ini berbeda dengan *SKT* yang mencantumkan tanggal pembuatan dan nama pembuat surat pada bagian awal surat.

1. Isi surat

Isi surat dalam *SKT* merupakan narasi dari proses pemeriksaan yang dilakukan kepada Raja Tambuku dan para bobatonya. Secara singkat, proses pemeriksaan digambarkan sebagai berikut.

1. Pemeriksaan terhadap Raja Tambuku
2. Pemeriksaan terhadap Boki Tilah Mahalu
3. Pemeriksaan terhadap Gogugu Lesmangan
4. Pemeriksaan terhadap Kapiten Lau Leros
5. Pemeriksaan terhadap Imam Kapten Perang Danedah
6. Pemeriksaan terhadap Mayor Perang Temano
7. Pemeriksaan terhadap Kapita Kota Hatib Tolire
8. Pemeriksaan terhadap Kapita Kota Banggai
9. Pemeriksaan terhadap Juru Tulis Ternate
10. Pemeriksaan terhadap Muazin Ici
11. Hasil Pemeriksaan
12. Perkara-perkara kesalahan pelanggaran
13. Hasil Keputusan

Berdasarkan ringkasan di atas, dapat diketahui bahwa *SKT* menarasikan proses pemeriksaan sebelum turunnya konsideran, desideratum dan diktum. Inti dari surat keputusan yang berisi tiga hal pokok surat keputusan terdapat pada isi surat. Konsideran yang berisi undang-undang, keputusan, atau peraturan yang diasosiasikan dengan kata “Menimbang” terlihat pada: “Syahdan daripada itu, kami cari hakim timbang-menimbang serta menilik pada Hakim As syar’i dan Hakim Al’ adat/ beroleh empunya patut dan harus di dalam kitab Allah, yaitu Raja Tambuku dan Boki Tila Mahalu dengan kepala-kepala Tambuku... (*SKT*: 20, baris ke-23)”.

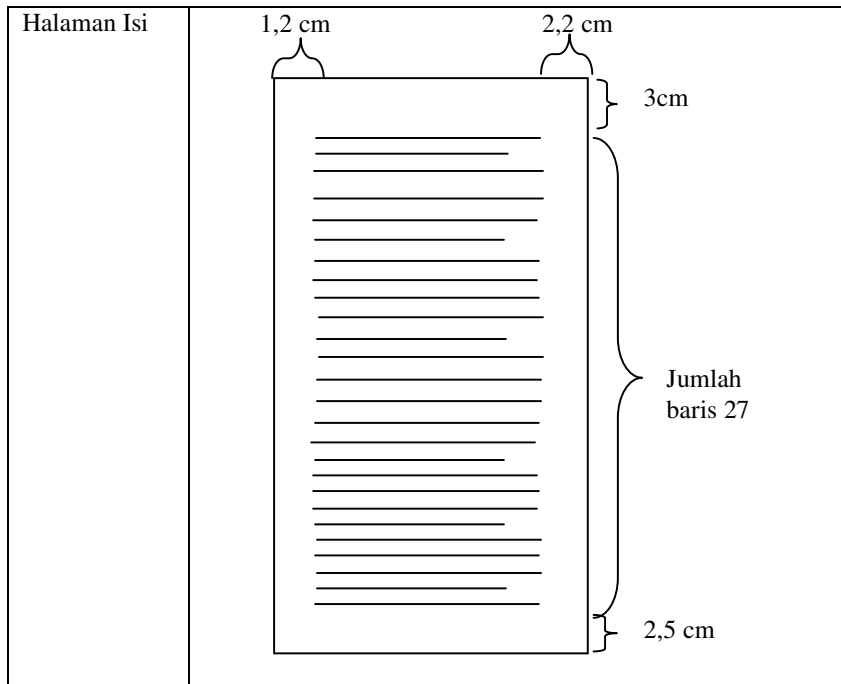
Selanjutnya, desideratum yang memuat tujuan *SKT* diturunkan, dapat dilihat pada: “Kami cari hakim mempersembahkan kepada Paduka Sri Sultan pada menilik *keperkasaan* dan *penimbangan*

kami ini/ ialah suda menerima baik *bersuatu* dengan kami (*SKT*: 21, baris 10-11)”. Peneliti menyimpulkan teks tersebut merupakan desideratum karena desideratum dapat diasosiasikan dengan kata “Mengingat”. Hal ini sejalan dengan mengingat *SKT* turun atas perintah Sultan Ternate yang peritahnya merupakan hal yang wajib dilakukan.

Bagian diktum yang merupakan isi keputusan dapat dilihat pada keputusan hakim yang memutuskan Raja Tambuku dan para bobatonya mendapat hukuman pengasingan. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan:

Memutuskan, beri hukuman kepada olehnya, yakni/ Raja Tambuku Kaicili Dongke Kombe di negeri Gamkonorah, Boki Tila Mahalu di negeri Soa, Kapita Lau Leros/ di negeri Lolodah, Kapita Kota Banggai di negeri Tolofuo, Kapita Kota Hatib Tolire di negeri Tobelo,/ Imam Kapten Perang Danedah dengan Mayor perang Temano di negeri Kao. Maka Raja Tambuku Kaicili Dongke Kombe dan Boki Tila Mahalu sehingga mati/ dan Kapita Lau Lerus, Kapita Kota Banggai, Kapita Kota hatib Tolire, Mayor Perang Temano, Imam Kapten Perang Danedah, yaitu dua puluh tahun lamanya/ (*SKT*: 20, baris 11—16).

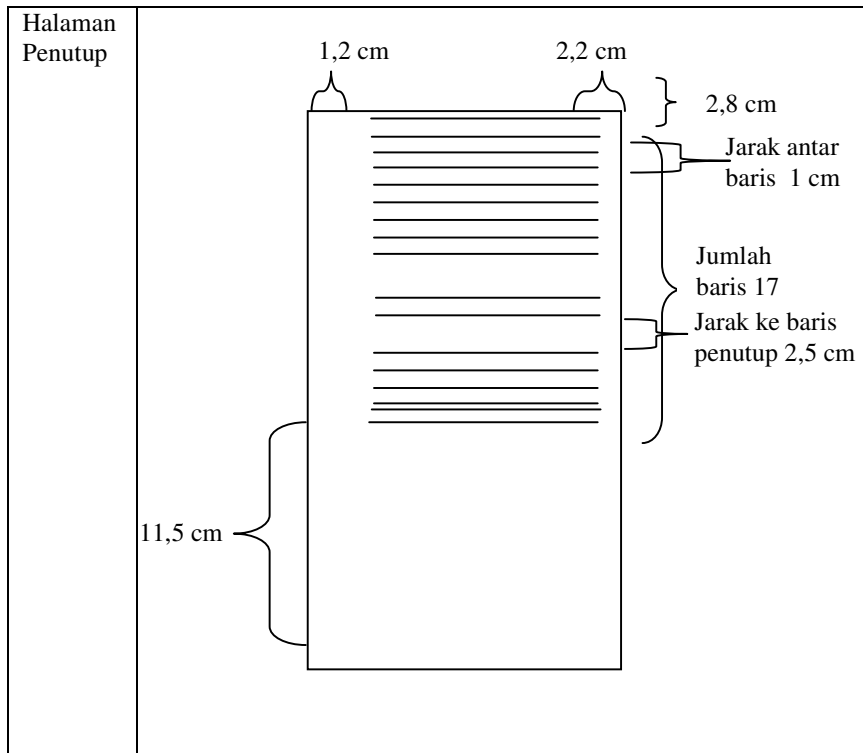
Hal ini menunjukkan bahwa *SKT* sebagai surat keputusan masa lampau mempunyai beberapa format yang memiliki kesamaan dengan surat keputusan masa kini. Kesamaan tersebut merupakan tiga pokok yang harus ada dalam surat keputusan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur surat keputusan masa kini merupakan adopsi dari surat keputusan masa lampau.



(Gambar 4: Ilustrasi Halaman Isi Naskah)

Penutup Surat

Naskah *SKT* hanya ditutup dengan pernyataan bahwa Syekh Abdul Rahman juga akan mendapatkan hukuman sebagai akibat dari perbuatannya. Syekh Abdul Rahman adalah orang Arab yang bersekutu dengan Tambuku untuk menyerang Ternate. Namun, hukuman untuknya diserahkan kepada Residen Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Residen Belanda mempunyai kedudukan yang tinggi di Ternate.



(Gambar 5: Ilustrasi Halaman Penutup Naskah)

Pada bagian penutup *SKT*, tidak ditemukan nama instansi dan nama pembuat keputusan. Penulisan instansi dan nama pembuat keputusan dalam *SKT* terletak di bagian awal naskah. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan *SKT* dengan surat keputusan masa kini terlihat pada perbedaan posisi tanggal pembuatan surat dan nama pembuat surat.

Kandungan Isi dari Aspek Sejarah

Gambaran Umum Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tambuku

Wilayah Tambuku jatuh ke tangan Ternate pada pemerintahan Sultan Baabullah dalam ekspansi militernya. Pada 1580 ekspedisi Sultan Baabullah mulai mencapai daerah Sulawesi. Sultan Baabullah berhasil menaklukkan wilayah Bungku (Tambuku), Tiworo, Wolio (Buton), Ambon, Selayar, dan kerajaan-kerajaan di pantai timur dan utara Sulawesi dan di bagian selatan Mindanao dan menyebarkan agama Islam ke wilayah-wilayah tersebut¹⁴. Sejak saat itu, wilayah Bungku (Tambuku) jatuh ke tangan Ternate. Ketika para penakluk Ternate tiba di Tambuku, rakyat di wilayah ini melihat bahwa status kekuatan dan kekuasaan Ternate melebihi apa yang dimiliki rakyat Tambuku sendiri.

Hubungan historis antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tambuku terjadi juga dalam hal politik pemerintahan Tambuku. Setiap kali terjadi pemberontakan di Tambuku, Sultan Ternate dengan segera meredam aksi pemberontakan tersebut. Pengangkatan raja di Tambuku pun tidak akan mendapat legitimasi politik sebelum mendapat persetujuan dari Sultan Ternate. Selain itu, struktur pemerintahan Kerajaan Tambuku pun diadopsi dari struktur pemerintahan Kesultanan Ternate.

Pemberontakan Kerajaan Tambuku

Kebijakan politik yang dilakukan Kerajaan Ternate pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Zain (1823-1859) banyak menimbulkan rasa ketidakpuasan di Tambuku. Pada awalnya rasa ketidakpuasan ini hanya dirasakan oleh segelintir kaum elite tertentu, namun tindakan Ternate yang semena-mena tersebut membuat rasa ketidakpuasan dengan cepat meluas ke kalangan rakyat.

Pada 1826, setelah wafatnya Raja Tambuku, Kaicili Papa, pemberontakan terbuka terjadi di Tambuku. Perlawanan separatis

¹⁴ Syakir Mahid, dkk., *Sejarah Kerajaan Bungku*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 252

rakyat Tambuku ini dipicu oleh berbagai faktor. Di antaranya, pungutan upeti yang membebani rakyat Tambuku. Selain jumlahnya yang besar, tugas untuk mengantarkan ke Ternate juga memberatkan rakyat Tambuku. Selain masalah upeti, pemberontakan juga dipicu oleh ketidakrelaan para istri rakyat Tambuku karena suaminya harus mengantarkan upeti dengan mendayung perahu dari Tambuku ke Ternate dan memprotes tindakan pangeran-pangeran Ternate karena penzaliman terhadap suami mereka. Penzaliman tersebut memakan waktu yang lama, bahkan tidak jarang para suami tidak kembali ke Tambuku. Para pangeran mempekerjakan suami mereka untuk menyelam mencari mutiara di Kao atau teripang di pulau Halmahera Selatan dengan makanan yang ditanggung sendiri.

Masalah pemungutan upeti pada akhirnya menjadi masalah yang krusial bagi rakyat Tambuku. Upeti yang harus diantarkan ke Ternate setiap tahunnya menjadi tidak teratur. Pada akhirnya, atas desakan kaum elite Tambuku—Raja Tambuku, Kaicili Papa—memberikan dukungan terhadap gerakan anti-Ternate. Klimaks ketidakpuasan rakyat Tambuku terjadi setelah wafatnya Kaicili Papa. Hal ini disebabkan oleh permaisuri Kaicili Papa datang ke Ternate untuk menyerahkan kesetiaannya terhadap Ternate dan meminta bantuan sultan untuk menghabisi para pemberontak di Tambuku. Puncak kekecewaan rakyat Tambuku terjadi pada tahun 1826. Untuk meredam pemberontakan ini, Sultan Muhammad Zain mengirim armada *hong*¹⁵ beserta ribuan tentaranya. Namun, kekuatan rakyat Tambuku tidak bisa dikalahkan sehingga Sultan Ternate meminta bantuan Belanda untuk meredam pemberontakan tersebut. Atas bantuan Belanda, pemberontakan ini dapat dipadamkan.

Pascapemberontakan pada 1826, serangkaian pemberontakan Tambuku terhadap Ternate terus terjadi. Pada 1839, perlawanan separatis kembali terjadi. Namun, perlawanan tersebut tidak sebesar

¹⁵ Armada terorganisasi yang terdiri dari kora-kora yang digunakan dalam peperangan di kalangan kelompok-kelompok pribumi.

1826. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan Ternate meredam perlawanan tanpa bantuan Belanda.

Pada 1840, pada masa pemerintahan Raja Bukungku, rakyat Tambuku kembali mengangkat senjata melawan Ternate. Bukungku diangkat menjadi Raja Tambuku karena kesetiaannya terhadap Ternate. Namun, pemberontakan ini dipelopori oleh Daeng Makaka, seorang pangeran Bugis yang berhasil menjatuhkan Raja Bukungku. Pada pemberontakan ini Daeng Makaka berhasil melepaskan diri dan baru ditangkap pada 1848.¹⁶

Dua tahun setelah pemberontakan tersebut, terjadi pemberontakan besar pada tahun 1842 oleh Raja Tambuku, Dongke Kombe. Pada pemberontakan ini, Sultan Ternate membutuhkan lebih banyak pelayaran *hong* untuk memulihkan kekuasaan Sultan Ternate di Tambuku. Pemberontakan yang terjadi pada masa pemerintahan Dongke Kombe disebabkan oleh kesalahan Sultan Ternate dalam memerintah dan aktivitas perompakan laut Mangindanao dan Tobelo. Baik para bangsawan Tambuku, maupun Ternate terbukti memiliki hubungan dengan para perompak ini. Utusan bernama Abdul Rahman telah membuat hubungan persahabatan dengan seorang perompak terkenal bernama Robodoi dan memberikan persembunyian untuk istri dan anaknya di Banggai sementara ia melakukan perompakan di Teluk Tomini.¹⁷

Apa yang disebutkan di atas sejalan dengan yang tertulis dalam naskah peti berkode 113 H 8/30. Dalam naskah disebutkan bahwa terdapat utusan bernama Syekh Abdul Rahman, yang merupakan utusan Ternate, ketika sampai di Tambuku melakukan perompakan dan bersekutu kepada Tambuku. Seperti dalam kutipan:

“Dan syekh Abdul Rahman itu mendapat salah tersebut sekalian nama-nama Tombuku empunya teturan semuanya terpakat/ yang syekh Abdul Rahman itu tatkala utusan Ternate sampai, dianya bersuatu dengan orang Tombuku dan Bugis/ berperang dengan Ternate, tetapi empunya putusan hukuman itu serahkan kepada paduka tuan residen/ jua adanya//” (SKT: 24, baris 14—17).

¹⁶ Adnan Amal, *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950*, (Makassar, 2007), h. 365

¹⁷ Syakir Mahid, dkk., *Sejarah Kerajaan Bungku*, h. 100

Naskah berkode 113 H 8/30 tersebut turun sebagai akibat pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Dongke Kombe yang dibantu para bobatonya. Pada pemberontakan kali ini, Raja Tambuku dibantu oleh orang Bugis dan Kapita Laut Kota Banggai. Para pemberontak, yaitu Raja Dongke Kombe beserta para *Gogugu* dan para bobatonya dinyatakan bersalah karena telah melanggar perjanjian sebelumnya. Raja Dongke Kombe dan para bobatonya mendapatkan hukuman berupa pengasingan. Seperti dalam kutipan:

“Kami cari hakim memaparsembahkan kepada Paduka Seri Sultan pada menilik keperkasaan dan penimbangan kami ini/ ialah suda menerima baik bersuatu dengan kami. Memutuskan, beri hukuman kepada olehnya, yakni/ Raja Tambuku Kaicili Dongke Kombe di Negeri Gamkonorah, Boki Tilah Mahalu di Negeri Soa, Kapita Lau Lerus/ di negeri Lolodah, Kapita Kota Banggai di Negeri Tolofuo, Kapita Kota hatib Tolire di Negeri Tobelo,/ Imam Kapten Perang Danedah dengan Mayor Perang Temano di Negeri Kao. Maka Raja Tombuku, Kaicili Dongke Kombe dan Boki Tilah Mahalu sehingga mati/ dan Kapita Lau Lerus, Kapita Kota Banggai, Kapita Kota Hatib Tolire, Mayor Perang Temano, Imam Kapten Perang Danedah, yaitu dua puluh tahun lamanya” (SKT: 21, baris 11—16).

Pemberontakan ini pada akhirnya dapat dipadamkan setelah armada kora-kora dikirim ke Tambuku dan mengorbankan lima ratus orang Ternate. Pemberontakan ini dapat diselesaikan dengan bantuan Belanda.

Surat Keputusan Ternate merupakan kepanjangan dari perjanjian yang dilakukan sebelumnya antara Sultan Zain (Sri Sultan Amiruddin Qaulain Syah) dengan Raja Tambuku pada tahun 1828.¹⁸ Surat perjanjian tersebut berkolofon 16 Rajab 1243. Jika dikonversikan ke tahun masehi dapat diketahui bahwa surat perjanjian tersebut dibuat pada 29 Januari 1828. Surat perjanjian tersebut dibuat pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad Zain yang memerintah 1825-1859 karena Raja Sidrima, Raja Tambuku

¹⁸ Surat Perjanjian antara Sultan Zain dan Raja Tambuku sebelumnya berkode 113 I/ 35.

pada masa itu merusak salah satu daerah di bawah Ternate. Raja Tambuku Dongke Kombe melanggar perjanjian yang telah dibuat sebelumnya mengenai kepatuhan kerajaan Tambuku terhadap Ternate.

Turunnya *SKT* telah menunjukkan supremasi Ternate atas Tambuku. *SKT* merupakan kecaman bagi Tambuku agar pemberontakan tidak terulang kembali. Sultan tidak segan menghukum orang-orang yang melakukan penyerangan terhadap pemerintahannya.

Kami cari hakim mempersembahkan kepada Paduka Sri Sultan pada menilai *keperkasaan* dan *penimbangan* kami ini/ ialah suda menerima baik *bersuatu* dengan kami. Memutuskan, beri hukuman kepada olehnya, yakni... (*SKT*, hlm. 21, baris 11-12).

Setelah pemberontakan 1842 tersebut, Sultan Ternate sangat berhati-hati dalam mengangkat sultan di wilayah taklukannya. Sultan hanya mengangkat seseorang yang mempunyai tingkat kesetiaan yang tinggi terhadap Ternate.

Namun, *SKT* juga menunjukkan buruknya sultan dalam memimpin sehingga menimbulkan pemberontakan-pemberontakan di wilayah taklukannya. Selain itu, *SKT* juga menunjukkan lemahnya sultan dalam mengatasi pemberontakan. Hal ini dapat dilihat dari tindakan sultan yang selalu meminta bantuan Belanda untuk meredam pemberontakan.

kami ada berserahkan di atas penimbangan dan pmutusan ini kepada yang ter[k]hormat Tuan Residen Ternate / Derick Frederick Hermanes Helbih yang memegang perintah yang ketinggian dari nama Tuan Government Wilanda ke dalam kota Oranye/ dengan kami men(d)engar jua, ialah menerima baik adanya (*SKT*, hlm. 21, baris 16-19).

Peristiwa pemberontakan menunjukkan bahwa penaklukan Kerajaan Tambuku hanya mendatangkan kekacauan saja karena mendatangkan perlawanan-perlawanan dari penduduknya.

Penutup

Surat Keputusan Ternate merupakan surat keputusan yang diturunkan oleh Kesultanan Ternate untuk Kerajaan Tambuku yang melakukan pemberontakan terhadap Ternate. *Surat Keputusan Ternate* atau disingkat *SKT* merupakan naskah satu-satunya di Indonesia yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Penulis tertarik meneliti naskah ini disebabkan oleh beberapa faktor, (1) penelitian mengenai naskah timur di Indonesia, khususnya surat masih sangat sedikit; (2) penelitian mengenai struktur surat keputusan pada naskah lama belum pernah dilakukan; (3) berdasarkan isinya, mengenai Kerajaan Tambuku, merupakan informasi baru bagi penulis sehingga naskah ini merupakan objek penelitian yang menarik. Tujuan penelitian terhadap naskah *SKT* adalah untuk menghasilkan edisi teks naskah sehingga naskah *SKT* yang beraksara jawi, dapat dialihaksarakan ke bahasa Latin agar naskah *SKT* dapat dipahami pembaca. Selain itu, tujuan penelitian terhadap naskah ini adalah untuk mengetahui struktur surat keputusan pada naskah dan mengetahui peristiwa dan latar belakang turunnya *SKT*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode edisi kritis. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu menjadikan naskah mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan beberapa tahapan penelitian. Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mencari dan menelusuri naskah yang sesuai untuk dijadikan penelitian, yaitu surat daerah timur nusantara pada naskah lama sebagai objek penelitian. Hal ini disebabkan oleh jumlah halamannya yang terbatas sehingga memudahkan penelitian. Di samping itu, pengkajian mengenai surat daerah timur nusantara pada naskah lama pun masih sangat sedikit sehingga penelitian mengenai surat merupakan hal yang baru dan menarik. Selain itu, meneliti naskah peti yang masih minim dalam hal penelitian pun merupakan hal yang menarik sehingga penulis tertarik untuk menjadikan surat pada naskah peti untuk dijadikan penelitian. Berdasarkan dua kriteria inilah peneliti tertarik untuk meneliti *Surat Keputusan Ternate* untuk dijadikan objek penelitian. Tahapan

selanjutnya adalah melakukan inventarisasi dan deskripsi. Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui jumlah naskah yang tersebar di berbagai tempat, sedangkan deskripsi dilakukan untuk mengetahui keadaan naskah dan informasi lainnya yang berhubungan dengan naskah. Tahapan selanjutnya adalah melakukan transliterasi, yaitu mengalihaksarakan naskah dari aksara jawi ke aksara latin sehingga dapat dipahami pembaca. Tahap selanjutnya adalah analisis struktur surat keputusan pada naskah, dan analisis dari aspek sejarahnya, yaitu mengenai pemberontakan kerajaan Tambuku terhadap Ternate.

Pada *SKT*, penulis menemukan beberapa kekhasan pada bahasanya. Kekhasan bahasa naskah tersebut dapat terlihat dari beberapa kata yang (1) mengalami penambahan fonem /h/, seperti *adah, bacah, bicarah, lamah, membawah, memeriksah, mintah, mudah, pergih, pulah, sangkah, senjatah, samah, suarah*; (2) mengalami pelesapan fonem /h/, seperti *bole, bawa, kasi, menyuru, sala, suda, sunggu*; (3) terdapat imbuhan *ta-* dari *ter-* dan *ba-* dari *ber-*, seperti *talalu* dan *badagang*; dan (4) perubahan akhiran *-an* menjadi *-ang*, seperti *bantuang, bulang, hutang, senapang*. Kekhasan naskah ini merupakan kekhasan dari bahasa Melayu-Ternate. Bahasa tulis orang Melayu-Ternate sesuai dengan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka ucapkan. Hal inilah yang menunjukkan kekhasan dari bahasa Melayu-Ternate.

Berdasarkan kegunaan, *SKT* tergolong ke dalam surat registrasi karena surat tersebut berisi pencatatan pemeriksaan terhadap Raja Tambuku dan para bobatonya. Jika dilihat berdasarkan penampilan fisik, *SKT* digolongkan ke dalam surat biasa karena tidak ditemukannya iluminasi atau hiasan dalam surat. Berdasarkan isi, *SKT* digolongkan ke dalam surat bisnis karena *SKT* berisi mengenai hubungan kerja sama antara Kerajaan Tambuku dengan Ternate yang kemudian dilanggar oleh Raja Tambuku Dongke Kombe. Jika dilihat dari bahasanya, *SKT* merupakan surat formal karena menggunakan bahasa formal pada masanya, yaitu bahasa Melayu.

Struktur *SKT* dibagi menjadi empat bagian, yaitu halaman muka, pembuka surat, isi surat, dan penutup. Halaman muka *SKT* merupakan halaman kosong dan merupakan sampul surat. Halaman

pembuka berisi pengantar dan berisi kolofon. Dari kolofon tersebut dapat diketahui bahwa surat ditulis pada Sabtu, 11 Syawal 1258 H yang jika dikonversikan ke dalam tahun masehi dapat diketahui bahwa surat ditulis pada 15 November 1842. Hal ini berbeda dengan format surat keputusan masa kini, yaitu tanggal pembuatan dan nama pembuat keputusan diletakkan pada bagian akhir surat. Bagian isi terdiri dari pemeriksaan terhadap Raja Dongke Kombe, Boki Tilah Mahalu, dan para bobatonya, serta hasil pemeriksaan, dan perkara-perkara kesalahan pelanggaran. Setelah narasi dari proses pemeriksaan, pada bagian ini terdapat inti pokok dari surat keputusan, yaitu konsideran, desideratum, dan diktum. Tiga hal pokok ini terdapat di akhir bagian isi surat.

Berbeda dengan surat resmi lainnya, *SKT* ditutup dengan pemeriksaan terhadap Syekh Abdul Rahman dan pertimbangan mengenai hukumannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, perbedaan *SKT* dengan SK masa kini dapat dilihat pada beberapa hal, seperti pada bagian akhir surat keputusan, yaitu pada SK masa kini dicantumkan tanggal dan nama instansi beserta nama pembuat keputusan, sedangkan dalam *SKT*, bagian tersebut terletak di bagian awal. Selain itu, dalam SK masa kini langsung masuk pada putusan. Proses pemeriksaan dan latar belakang turunya SK tidak dinarasikan. Hal ini berbeda dengan *SKT* yang menarasikan proses pemeriksaan di awal surat. Perbedaan lainnya terlihat pada bagian akhir, yaitu dalam *SKT* penutup surat berisi narasi mengenai proses pemeriksaan terhadap Syekh Abdul Rahman. Hal ini berbeda dengan SK masa kini, yaitu setelah diktum (hasil keputusan) langsung ditutup dengan tanggal pembuatan surat dan tembusan.

Selain melihat perbedaan struktur surat keputusan pada masa lampau dengan masa kini, analisis terhadap *SKT* juga berguna dalam bidang hukum, yaitu bagaimana proses hukum dan pemberian sanksi terhadap pelanggar hukum di Kesultanan Ternate pada masa lampau.

Surat Keputusan Ternate merupakan bukti rekaman peristiwa sejarah masa lampau. Naskah ini dapat dijadikan referensi untuk mengetahui hubungan historis antara Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tambuku. Kerajaan Tambuku ditaklukkan Ternate pada

masa pemerintahan Sultan Baabullah. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Baabullah. Sultan Baabullah dikenal sebagai penguasa 72 pulau yang semuanya berpenduduk. Setelah Sultan Baabullah wafat, Kerajaan Ternate mengalami kemerosotan.

Tindakan Sultan Ternate yang mempekerjakan penduduk Tambuku dan kewajiban membayar upeti yang besar telah membuat rakyat Tambuku menderita. Rakyat Tambuku berkali-kali melakukan perlawanan dan terakhir perlawanan terbesar pada tahun 1842. Tambuku meminta bantuan orang Bugis dan Banggai. Pemberontakan ini melemahkan kekuasaan Ternate. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pasukan Ternate yang tewas dan Sultan Ternate tidak dapat menguasai keadaan sehingga sultan meminta bantuan Belanda untuk meredam pemberontakan.

Pemberontakan dapat diatasi dengan bantuan Belanda. Para tersangka, yaitu Raja Tambuku, Boki Tilah Mahalu, dan para bobato mendapat hukuman pengasingan. Raja dan Boki Tambuku diasingkan selama seumur hidup, sedangkan para bobato mendapat hukuman pengasingan selama 20 tahun.

Dalam naskah ini dapat diketahui bahwa Ternate merupakan boneka Belanda. Hal ini dapat dilihat dari posisi cap dan tanda tangan Belanda terdapat di sebelah kanan. Berdasarkan posisi cap kerajaan, dapat diketahui bahwa kedudukan Belanda lebih tinggi dibandingkan Sultan Ternate. Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Traktat London yang sebelumnya sudah dibuat persetujuan antara Sultan Ternate, Sultan Tidore, dan Belanda bahwa Belanda berkuasa atas Kerajaan Ternate, Tidore, dan semua wilayah taklukannya. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi Belanda sebagai kolonial sangat dominan di Kerajaan Ternate.

Penelitian mengenai naskah Indonesia timur masih sangatlah sedikit. Padahal, daerah timur nusantara juga memiliki khazanah pernaskahan yang kaya dan belum banyak tersentuh. Penelitian mengenai *Surat Keputusan Ternate* merupakan sebuah sumbangan dalam dunia pernaskahan nusantara. Selain karena penelitian ini belum pernah dilakukan, penelitian ini juga berguna untuk

menguak kronik serta konflik kerajaan yang mempunyai hubungan historis dengan kerajaan supremasinya.

Penelitian terhadap Naskah *SKT* ini masih berpeluang untuk dikaji lebih dalam lagi dari berbagai aspek, antara lain sebagai berikut: dalam bidang sejarah, penelitian mengenai keterkaitan Bugis dalam pemberontakan-pemberontakan yang terjadi terhadap Ternate perlu dilakukan. Pada aspek bahasa naskah dan pengaruhnya merupakan hal yang menarik sehingga penelitian terhadap aspek ini perlu dilakukan. Selain itu, pada bidang hukum, penelitian tentang aspek hukum lokal Ternate pun masih bisa dikaji lebih dalam lagi.

Selain *Surat Keputusan Ternate*, masih banyak naskah timur yang tersimpan dalam peti dan belum banyak diteliti. Padahal, naskah merupakan dokumen primer untuk mengetahui sejarah atau peristiwa pada masa lampau. Oleh sebab itu, penelitian, baik mengenai surat keputusan atau naskah timur lainnya dalam kajian ilmu filologi perlu dilakukan lebih banyak lagi.

Daftar Pustaka

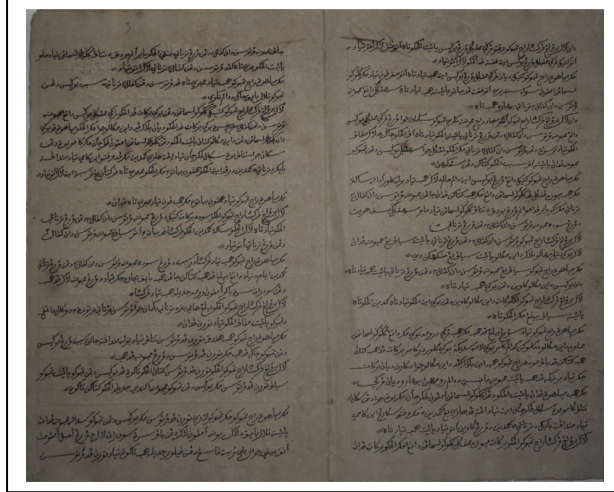
- Arifin, Zainal. 1996. *Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Surat Dinas*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Amal, Adnan. 2007. *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950*. Makassar: Nala Cipta Litera.
- Baried, Siti Baroroh, dkk. 1994. *Pengantar Teori Filologi*. Yogyakarta: BPFK Seksi Filologi.
- Churchill, W.A. 1935. *Watermarks in Paper in Holland, England, France, Etc in XVII and XVIII Centuries and Their Interconnection*. Amsterdam: Menno Hertzberger & Co.
- Finoza, Lamuddin, dkk., 1983. *Korespondensi Niaga Indonesia Modern*. Jakarta: Nina Dinamika.
- Gallop, Annabel Teh. 1991. *Surat Emas Budaya Tulis di Indonesia*. London: British Library.

- _____, 1992. "Southeast Asian Manuscript" (Leiden: Royal Institute of Linguistic and Anthropology).
- _____, 2002. "Manuscript from Insular South-East Asia: Epistolography" (dalam Royal Institute of Linguistic and Anthropology International Workshop on South-East Asian Studies No. 17). Leiden: KITLV.
- _____. 2006. "Multiple Impressions of Malay Seals" (dalam jurnal *Indonesia and the Malay World* Vol. 34). Leiden: Routledge.
- Jusuf, Jumsari, dkk., 1980. *Katalog Koleksi Naskah Maluku Cetakan Pertama*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mahid, Syakir, dkk. 2012. *Sejarah Kerajaan Bungku*. Yogyakarta: Ombak.
- Mu'jizah. 2004. *Surat Resmi dalam Sastra Melayu Lintas Daerah*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Mulyadi, Sri Wulan Rujati. 1994. *Kodikologi Melayu di Indonesia*. Jakarta: FSUI Press.
- Robson.S.O. 1994. *Prinsip-Prinsip Filologi Indonesia*. Jakarta: RUL.

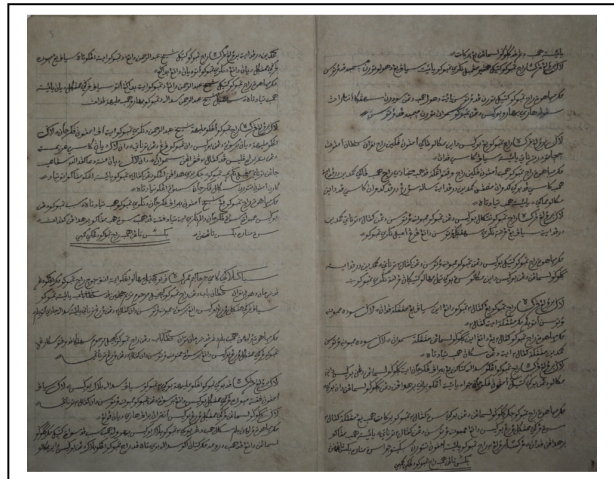
Lampiran 1



Lampiran 2



Lampiran 3



Lampiran 4

